



# RENCANA KERJA

TAHUN 2021



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Nomor: SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan perlu disusun Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13. Peraturan Presiden Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);



15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait.
- KEEMPAT : Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 menjadi arahan dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh



Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- KELIMA : Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2021, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 17 November 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA



SITI NURBAYA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth:  
Seluruh Pejabat Eselon I untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020  
RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021





## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*-MP) dengan daya ungkit tinggi. Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 memiliki tema Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial yang merupakan aksi cepat pemerintah dalam membangun Indonesia dari dampak pandemik Covid-19. Maka dari itu semangat yang dibangun dalam RKP Tahun 2021 diimplementasikan dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dengan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan tidak melupakan sisi spasial.

Pada tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pembangunan melalui strategi Prioritas Nasional 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan), Prioritas Nasional 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan), Prioritas Nasional 3 (Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing), dan Prioritas Nasional 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim). Penyusunan Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan *Major Project* (MP), (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan PP dan KP, serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan setiap rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan memperbaiki kondisi tapak seperti yang telah diharapkan.

Jakarta, 17 November 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA





## RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021

KLHK berupaya untuk membantu pemulihan ekonomi yang terdampak dari pandemi Covid-19 yaitu dengan membuka destinasi wisata alam, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pembinaan petani perhutanan sosial dengan memperhatikan protokol kesehatan. Upaya KLHK dalam menjawab tantangan-tantangan di Tahun 2021, tersaji pada Rencana Kerja KLHK Tahun 2021.

Rencana Kerja KLHK Tahun 2021 diterbitkan oleh Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta. Dokumen ini merupakan Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, yang memuat kinerja dan anggaran untuk memenuhi sasaran pembangunan nasional 2021. Rencana Kerja 2021 ini memuat hasil-hasil diskusi tiga pihak dalam berbagai forum yang secara resmi diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Keuangan dan internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Naskah dan tata letak disiapkan oleh Maidiward, Aristia Danang, Nurlaila Arumsari, Ariyanto Wibowo, Mustofa Bisri, dan Ibnu Siswo Bayu Aji. Editor Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan dan Sektetaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lokasi TWA Tangkuban Perahu  
Dokumentasi Mustofa Bisri  
Biro Perencanaan



# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR TABEL .....	XI
I. PENDAHULUAN.....	1
II. SASARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021 .....	5
III. DUKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL .....	10
IV. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN .....	27
A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	28
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	29
C. Ekspor Hasil Hutan .....	30
D. Kawasan Konservasi dengan Nilai Minimal 70.....	30
E. Kesatuan Pengelolaan Hutan .....	31
F. Kinerja Akses Kelola Perhutanan Sosial.....	32
G. Provinsi yang dapat Dilindungi dari Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan.....	32
V. PENGARUSUTAMAAN .....	36
VI. PENUTUP .....	38
LAMPIRAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021 .....	39



# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Peran KLHK Pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 .....	2
Gambar 3.1 Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan .....	11
Gambar 3.2 Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan .....	15
Gambar 3.3 Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing .....	17
Gambar 3.4 Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.....	21
Gambar 4.1 Capaian IKLH, IKA, IKU, dan IKTL Tahun 2015-2019 .....	28
Gambar 4.2 Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang LHK Tahun 2015-2019 .	29
Gambar 4.3 Capaian Ekspor Hasil Hutan Tahun 2015-2019.....	30
Gambar 4.4 Jumlah Kawasan Konservasi dengan Nilai Efektifitas Pengelolaan Minimal 70.....	31
Gambar 4.5 Perkembangan Perhutanan Sosial Tahun 2015-2019 .....	32
Gambar 4.6 Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Seluruh Indonesia Tahun 2015 - 2019 .....	33




# DAFTAR TABEL

---

Halaman

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama KLHK Tahun 2021 .....	6
Tabel 3.1 Alokasi Anggaran KLHK Dalam Mendukung Prioritas Nasional.....	10
Tabel 3.2 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang Mendukung Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1) .....	12
Tabel 3.3 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang Mendukung Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2).....	16
Tabel 3.4 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang Mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3) .....	17
Tabel 3.5 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang Mendukung Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6) .....	21
Tabel 4.1 Alokasi anggaran pada Setiap Program KLHK dalam Rencana Kerja Tahun 2021 .....	27
Tabel 4.2 Jumlah dan Luas KPH Pada Tahun 2019 .....	31





KLHK berupaya untuk membantu pemulihan ekonomi yang terdampak dari pandemi Covid-19 yaitu dengan membuka destinasi wisata alam, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pembinaan petani perhutanan sosial dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Dokumentasi Biro Humas KLHK



## I. PENDAHULUAN

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan tahun 2020 untuk keberhasilan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode tersebut. Sejak awal hingga triwulan kedua tahun 2020, hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, terjangkit penyebaran pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia yang menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di semua negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Memperhatikan hal ini, perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali lancar. Oleh karena itu, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial". Mengacu pada RPJMN 2020-2024, terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) dengan pendekatan yang berbeda dari periode sebelumnya yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*-MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dalam RKP 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024. Sebagaimana RPJMN 2020-2024 telah menetapkan MP sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, maka beberapa MP direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP 2021.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (*Germas*), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun nonalam.

Adapun tujuh PN RKP 2021 meliputi (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi



dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021, beberapa MP fokus pada PN yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu pada PN 1 (MP Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas; MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas; MP 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 *Smelter*; MP Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan), PN 2 (MP Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKS N Paloh-Aruk, PKS N Nunukan, PKS N Atambua, PKS N Kefamenanu, PKS N Jayapura, & PKS N Merauke), PN 3 (MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, MP Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh), PN 5 (MP Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu), PN 6 (MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana), dan PN 7 (MP Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT), serta Penguatan Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan *Major Project* baru yang diusulkan pada tahun 2021 pada PN 3.

Mengacu pada RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pada PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 6, serta pelaksanaan MP fokus MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, MP 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 *Smelter*, MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, dan MP Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana. Selain itu, KLHK juga melaksanakan MP Ibu Kota Negara (IKN), MP Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis, MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3, serta melanjutkan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) diantaranya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Peran KLHK pada RKP Tahun 2021 ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Peran KLHK pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021



Penyusunan Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2021 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024, (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan MP, (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan PP dan KP, serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Rencana Kerja Kementerian LHK Tahun 2021 menjabarkan rencana pembangunan nasional dan Rencana Strategis Kementerian LHK 2020-2024 secara lebih rinci kedalam PN, PP, KP, MP, dan Prioritas Bidang (PB) dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasarnya secara efektif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif (*corrective actions*) untuk meningkatkan pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara berkelanjutan. Peninjauan ulang kebijakan dimaksud adalah: (1) memastikan penurunan yang signifikan atas laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, (2) mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta mengatasi pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi dan pertumbuhan ekonomi, (3) menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, (4) menyelaraskan arah kebijakan KLHK ke depan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's, SDG's*), (5) menyukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (*Nationally Determined Contribution-NDC*) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional, dan (6) melibatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam akses kelola hutan serta memberikan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat didalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya. Selain itu, langkah-langkah korektif yang telah ditempuh diantaranya: (1) menerapkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui restorasi, pengelolaan dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan serta pengurangan laju deforestasi, (2) mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus pada pengelolaan kayu ke arah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan dan berbasis masyarakat, (3) menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui perhutanan sosial dan kemitraan konservasi, (4) menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan kasus tenurial kehutanan dan memberikan aset legal lahan bagi masyarakat melalui program tanah obyek reforma agraria (TORA), (5) menginternalisasi prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung



lingkungan kedalam penyusunan revisi rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN) sebagai arahan spasial makro pembangunan kehutanan tahun 2011-2030, (6) mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati yang terancam punah, dan (7) melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kombinasi dari peninjauan ulang kebijakan beserta langkah-langkah korektif tersebut merupakan reorientasi strategis menuju pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang lebih bijaksana pada masa yang akan datang.



Meningkatnya limbah medis infeksius akibat menyebarnya virus Covid-19 perlu segera ditangani agar tidak menjadi ancaman lingkungan. KLHK bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengolah limbah medis infeksius. Salah satu contohnya adalah pengolahan limbah medis dengan insinerator di Kota Makassar.

Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSLB3



## II. SASARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021

Sasaran pembangunan nasional tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, dengan indikator dan target pembangunan meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,5-9,1 %
3. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2-9,7 %
4. Rasio Gini sebesar 0,377-0,379
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78-72,95
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 23,55-24,05 % (menuju target *Paris Agreement* sebesar 29% di 2030)

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini memperhatikan arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional tahun 2021. Target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung target pembangunan nasional pada tahun 2021 diantaranya:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,96
2. Penurunan emisi GRK sebesar 24,05 %
3. Penurunan intensitas emisi GRK sebesar 26,37 %
4. Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif) sebesar 65 juta hektar
5. Pelepasan kawasan hutan untuk Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar
6. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan Ibu Kota Negara seluas 1.500 hektar
7. Pemulihan Ekosistem pada Kawasan IKN seluas 1.200 hektar
8. Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA seluas 180.000 hektar
9. *Policy Brief* Konsep *Forest City* dalam Perencanaan IKN
10. Kawasan Hutan yang memperoleh akses Kelola perhutanan sosial seluas 250.000 hektar
11. Destinasi Wisata Alam sebanyak 15 Destinasi
12. Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 56.000 hektar

Dukungan Kementerian LHK pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 tersebut telah sejalan dengan Rencana Strategis KLHK 2020-2024 dimana ada empat Sasaran Strategis meliputi pilar ekologi, pilar ekonomi, pilar sosial tata kelola yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan nasional dan kelestarian lingkungan hidup dan hutan. Pencapaian target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan terhadap target pembangunan nasional tahun 2021 dilaksanakan melalui empat Sasaran Strategis dan dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



- (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
  3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
  4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, (6) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (7) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama KLHK Tahun 2021

IKU	Indikator Kinerja Utama	Target Kerja 2021	Satuan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,96	Poin
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah	16,75	%
3	Penurunan Laju Deforestasi	0,43	Juta ha
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	63	Poin
5	Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya	220	Ribu ha
6	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi ( <i>High Conservation Values</i> )	13,80	Juta ha
7	Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional	106	Rp. Triliun
8	Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan <i>Bioprospecting</i>	13	US\$ Milyar
9	Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK	5,2	Rp. Triliun



IKU	Indikator Kinerja Utama	Target Kerja 2021	Satuan
10	Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	3,5	Juta ha
11	Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)	65	Ribu ha
12	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	250.000	ha
13	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	2,2	Poin
14	Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum	2.267	Kasus
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,55	Poin
16	Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif	70	Produk
17	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	72	Poin
18	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	79	Poin
19	Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK	1	Opini WTP
20	Level Maturitas SPIP KLHK	3	Level







Kelestarian alam Indonesia harus selalu dijaga dan dirawat, alam telah membuat ekosistem alami yang menjadi tempat hidupnya ribuan jenis flora fauna serta membuat ekosistem sosial yang bermanfaat untuk masyarakat dari jasa lingkungan yang dihasilkan.

Dokumentasi Balai Taman Nasional Gunung Merapi

### III. DUKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Nasional Tahun 2021 menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. KLHK mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut antara lain Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3), dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6). Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan sebesar Rp. 3.848 Trilyun dari total alokasi Rp. 7.957 Trilyun pada tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Alokasi anggaran KLHK dalam mendukung Prioritas Nasional

No.	Prioritas Nasional	Alokasi 2021 (Ribu Rupiah)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	624.629.895,00
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	40.171.000,00
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	315.720.096,00
4.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2.867.943.650,00
<b>Total</b>		<b>3.848.464.641,00</b>

#### PRIORITAS NASIONAL 1:

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 mendukung Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. KLHK membantu memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19, melalui: (1) menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan, (2) penguatan penyediaan energi yang terjangkau, (3) penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor, (4) pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata,





dan (5) penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan KLHK adalah:

- i. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan Kuantitas/ Ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung dan kawasan hutan produksi;
- ii. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator: (1) sub sektor kehutanan memberikan kontribusi dalam lingkup pertumbuhan PDB Pertanian meningkat, (2) produksi kayu terutama dari hutan produksi meningkat, dan (3) meningkatnya destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas.



Gambar 3.1 Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Tabel 3.2 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang mendukung Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	8.280.876,00
			Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH	6.000.000,00
			Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	37.263.618,00
		Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2.945.250,00
			Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1.000.000,00
			Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	5.150.000,00
			Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	9.839.617,00
			Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	74.609.196,00
			Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	95.174.335,00
			Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	95.951.787,00
	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	10.787.496,00
			Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan	2.657.267,00

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)		
			Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	5.713.422,00		
			Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	3.188.516,00		
			Fasilitasi Produksi HHBK	1.343.550,00		
		Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	4.397.579,00
					Pembinaan Teknis/ Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1.874.870,00
					Fasilitasi dan Pembinaan KPHP Menuju Kategori Maju	43.237.500,00
					SK Penetapan Kawasan Hutan	1.540.000,00
					Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	95.994.997,00
					<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	1.762.280,00
					Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	350.000,00
					KPHL Maju	1.722.120,00
					Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	
		Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	2.638.000,00		
			Danau dan Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya	2.899.954,00		
		Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	10.111.736,00
Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	2.771.796,00					



Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
			Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	8.075.879,00
			Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	500.000,00
			Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m <sup>3</sup> /tahun ke atas	900.000,00
			Pembinaan Teknis/Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	2.345.240,00
			Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	4.500.572,00
	Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	1.500.000,00
Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)			9.652.000,00	
Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan			27.260.000,00	
Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan			8.927.790,00	
Destinasi Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan			1.900.000,00	
Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi			25.262.652,00	
Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Keanekaragaman hayati			3.000.000,00	
Total				624.629.895,00



## PRIORITAS NASIONAL 2:

### Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 2 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Selain itu harus mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat. KLHK telah mendukung pengembangan wilayah diantaranya melalui rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif, rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis, pemantauan kualitas udara, pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas air laut, pengurangan timbulan sampah nasional, dan penanganan timbulan sampah nasional.

Arah kebijakan dan strategi dalam prioritas ini yang terkait dengan KLHK adalah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar, (2) penyiapan *grand design forest city* di Ibu Kota Negara, (3) Rehabilitasi hutan dan lahan serta pemulihan ekosistem pada kawasan Ibu Kota Negara, dan (4) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.



Gambar 3.2 Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan



Tabel 3.3 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang mendukung Prioritas Nasional Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	8.600.000,00
			001-Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	2.000.000,00
			002-Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	1.000.000,00
			003-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	6.050.000,00
			004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	22.521.000,00
Total				40.171.000,00

### PRIORITAS NASIONAL 3:

#### Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 3: (1) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*, (2) peningkatan pemerataan layanan berkualitas, (3) penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, (4) peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, (5) perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif, dan (6) serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

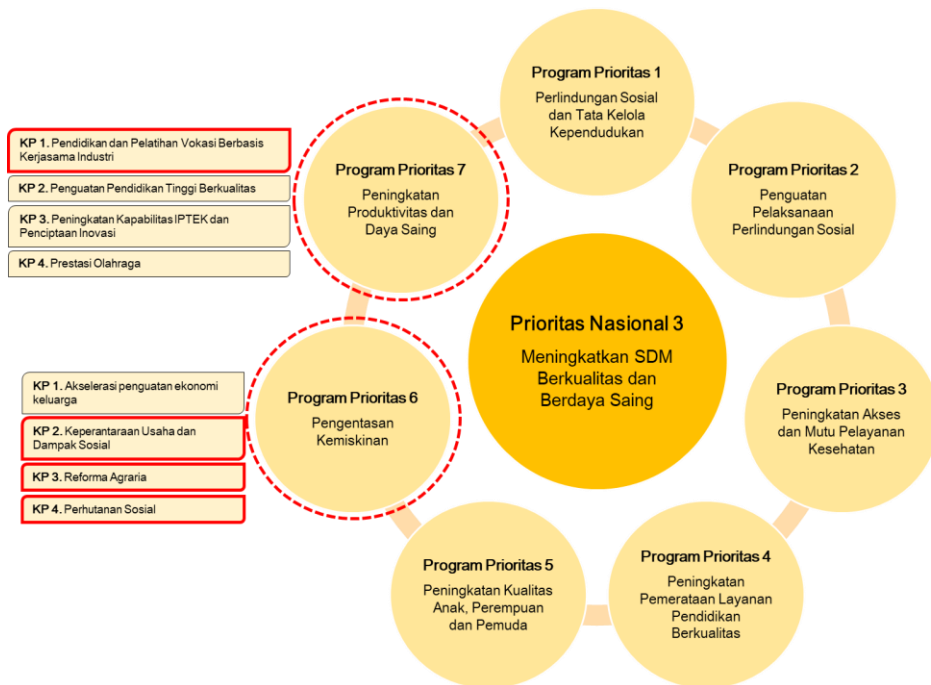
Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 3, yang dilakukan KLHK dalam Rencana Kerja Tahun 2021, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengentasan kemiskinan, dengan indikator yaitu: (1) meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, (2) meningkatnya luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), (3) meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan Kemitraan Kehutanan, dan (4) Jumlah Kelompok Tani Hutan



(KTH) Mandiri meningkat;

- b. Meningkatnya produktivitas dan daya saing SDM, dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapat pekerjaan, (2) Peningkatan jumlah lulusan pelatihan vokasi, (3) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional, (4) Peningkatan indeks peneliti, (5) Jumlah hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian dan pengembangan, (6) Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan masyarakat dan industri/badan usaha, dan (7) jumlah produk inovasi dari *tenant* perusahaan pemula berbasis teknologi yang dibina meningkat.



Gambar 3.3 Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Tabel 3.4 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	4.119.500,00
			KTH Mandiri yang terbentuk	2.100.000,00
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	2.300.000,00

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
	Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	2.000.000,00
			Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	26.928.596,00
			Data dan Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	500.000,00
	Perhutanan Sosial	Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat	Rekomendasi penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	16.460.000,00
			Izin perhutanan sosial yang dievaluasi	2.200.000,00
			Izin akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	3.750.000,00
			Hutan Adat dan Hutan Hak yang ditetapkan	4.500.000,00
			Kasus konflik tenurial yang dipetakan	2.700.000,00
			Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penanganannya	3.450.000,00
			Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	3.603.000,00
			Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	15.000.000,00
			Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	97.371.600,00
			Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan	5.200.000,00
			Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	44.537.400,00





Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	3.000.000,00
			Pembangunan Prasarana Sekolah	15.302.000,00
			Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	60.698.000,00
Total				315.720.096,00

#### PRIORITAS NASIONAL 6:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

KLHK dalam Rencana Kerja Tahun 2021 membantu penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

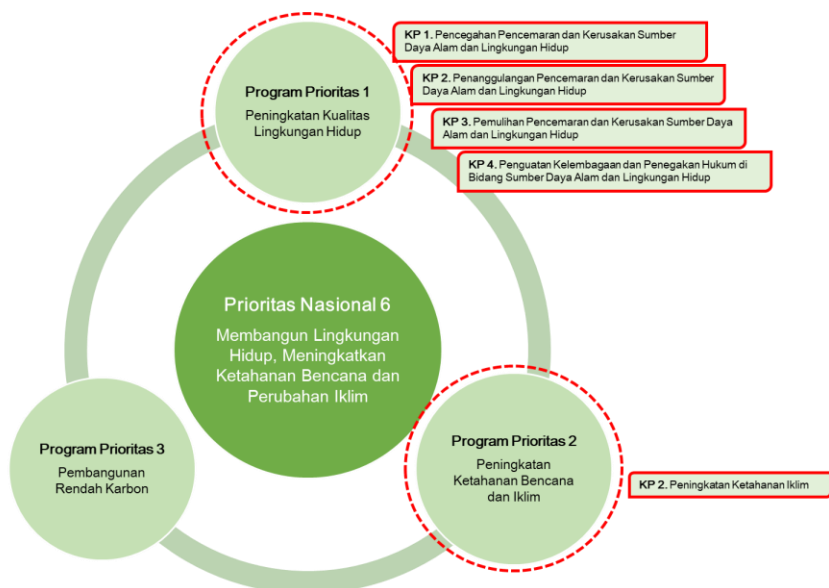
Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan KLHK:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:
  1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), terdiri atas: (1) indeks kualitas udara (IKU), (2) indeks kualitas air (IKA), (3) indeks kualitas air laut (IKAL), dan (4) indeks kualitas tutupan lahan (IKTL);
  2. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan lokasi pemantauan kualitas lingkungan, (2) Usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan meningkat, (3) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (*high conservation value/HCV*) yang dipertahankan secara nasional, (4) Luas kawasan konservasi yang dikelola seluas 27 juta hektar, (5) luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola meningkat, (6) Peningkatan jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup, dan (7) Penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun;
  3. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan sampah yang terkelola secara



- nasional, (2) Penurunan sampah yang terbuang ke laut, dan (3) Peningkatan limbah B3 yang terkelola;
4. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah, (2) meningkatnya jumlah Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan kondisinya, dan (3) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya;
  5. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Peningkatan persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2) Peningkatan jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang ditangani, (3) Peningkatan jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman, dan (4) jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan sebanyak 34 provinsi.
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim yang diupayakan dengan berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim melalui peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan indikator yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim menjadi 1,15% PDB sektor tersebut.
- c. Pembangunan rendah karbon yang diupayakan dengan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* meliputi:
1. Pembangunan rendah karbon dengan indikator yaitu: (1) penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, (2) penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor lahan, (3) penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor limbah, (4) penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor IPPU, dan (5) penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor pesisir dan laut;
  2. Pemulihan lahan berkelanjutan dengan indikator yaitu: (1) lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut per tahun meningkat dan (2) luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional per tahun;
  3. Pengelolaan limbah dengan indikator yaitu peningkatan jumlah sampah yang terkelola secara nasional;
  4. Pengembangan industri hijau dengan indikator yaitu: (1) meningkatnya persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi standar industri hijau/SIH menjadi 10 perusahaan, (2) Peningkatan jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor industri, dan (3) Peningkatan jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan;
  5. Rendah karbon pesisir dan laut dengan indikator yaitu peningkatan luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai.





Gambar 3.4 Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Tabel 3.5 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang mendukung Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	6.500.000,00
			Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	28.800.000,00
			Data dan Informasi Kualitas Air Manual	7.000.000,00
			Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	25.522.652,00
			Data dan Informasi Kualitas Air Laut	5.400.000,00
			Data dan Informasi Sampah Laut	2.305.340,00
		Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	2.000.000,00
			Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	7.000.000,00
			Fasilitasi Pemantauan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	500.000,00

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
			Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	900.000,00
			Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	1.000.000,00
			Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	1.000.000,00
		Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan	126.782.438,00
			Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemadaman Darat	13.057.500,00
			Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemadaman Udara	16.588.200,00
			Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi	49.000.000,00
			Lahan Gambut yang direstorasi pada 7 Provinsi	216.000.000,00
			Fasilitasi Desa mandiri peduli gambut di 7 Provinsi	20.000.000,00
			Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut	3.739.075,00
		Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	2.460.000,00
			Rancangan Standardisasi Bidang LHK	5.047.500,00
		Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	760.000,00



<b>Program Prioritas</b>	<b>Kegiatan Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas Nasional</b>	<b>Rincian Output</b>	<b>Total (Ribu Rupiah)</b>	
	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	10.000.000,00	
			Instalasi Pengolahan Air Limbah	40.850.000,00	
			Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	12.394.660,00	
		Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas		16.400.000,00
				Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	9.600.000,00
				Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	5.100.000,00
			Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK	3.600.000,00
		Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	53.800.000,00	
		Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut	4.000.000,00
				Alat Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah di Lahan Gambut pada 7 Provinsi	15.000.000,00
	Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya			3.000.000,00	
	Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3		Layanan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	13.930.000,00	



Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
			Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	2.600.000,00
			Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	23.050.000,00
		Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	1.000.000,00
		Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1.120.075,00
			Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2.226.750,00
		Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	73.535.414,00
			Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	9.630.080,00
			Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	8.219.391,00
			Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	142.147.400,00
	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Implementasi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon	1.000.000,00
			<i>HCFC Phase Out In The Polyurethane Foam Sector Project</i>	8.440.000,00
			RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	1.400.000,00
			Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	3.550.000,00



Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
			Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan	1.081.239,00
			Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK	796.601,00
			Kajian Kebijakan Bidang LHK	60.698,00
		Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	4.469.807,00
			Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	333.000,00
			Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	26.209.200,00
			Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	24.335.000,00
			Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	44.070.000,00
		Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	13.461.000,00
			Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	31.629.407,00
			Kasus Tindak Pidana LHK P21 Badan Usaha	3.930.593,00
Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Penanggulangan Bencana	Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	52.779.575,00
	Peningkatan Ketahanan Iklim	Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.082.575,00



<b>Program Prioritas</b>	<b>Kegiatan Prioritas</b>	<b>Proyek Prioritas Nasional</b>	<b>Rincian Output</b>	<b>Total (Ribu Rupiah)</b>
			Rehabilitasi Hutan Mangrove	30.352.427,00
		Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	1.443.230.357,00
			Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.429.950,00
			Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	16.098.344,00
			Sumber Benih Unggul yang Dibangun	5.170.077,00
			Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	150.000.000,00
			Benih Berkualitas	6.467.325,00
<b>Total</b>				<b>2.867.943.650,00</b>



## IV. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2021 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2021, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pemulihan pandemi Covid-19. Berikut merupakan rincian alokasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersaji dalam tabel 4.1 dalam mendukung pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Alokasi anggaran pada setiap program KLHK dalam rencana kerja tahun 2021

<b>Kode</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu (Ribu Rupiah)</b>
029.WA	Program Dukungan Manajemen	3.487.871.584,00
029.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.288.257.788,00
029.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	36.534.505,00
029.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	108.575.810,00
029.FD	Program Kualias Lingkungan Hidup	834.926.008,00
029.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	200.949.088,00
<b>Total</b>		<b>7.957.114.783,00</b>

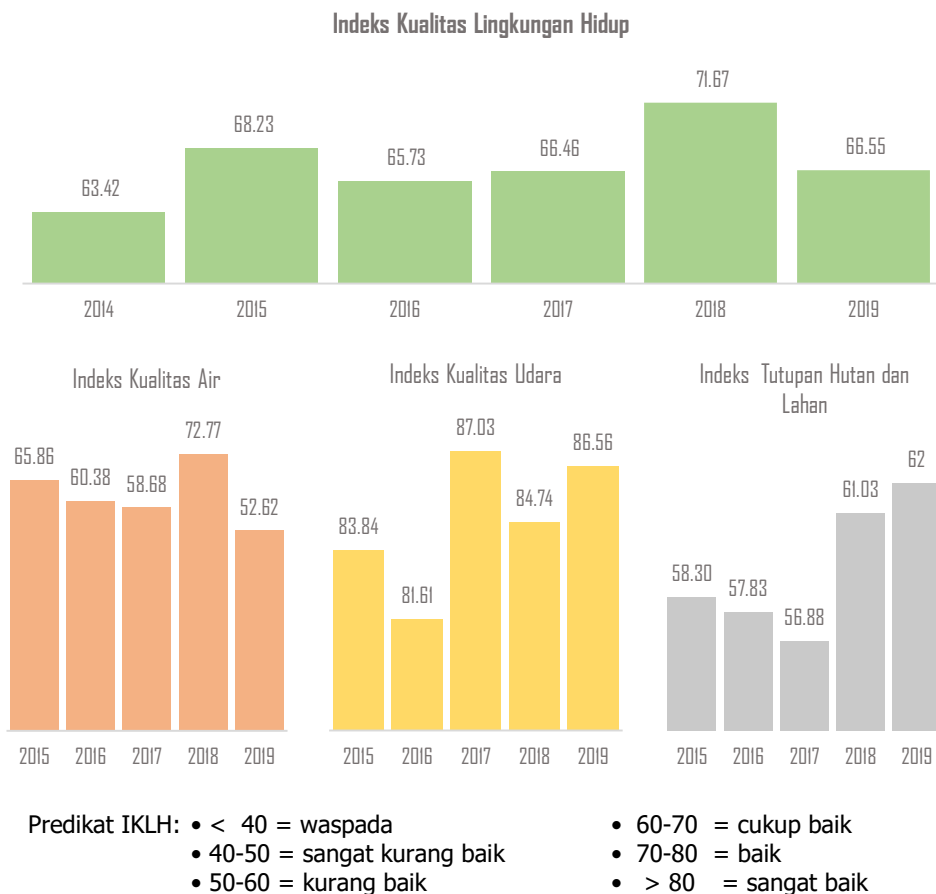
Pelaksanaan rencana kerja kedepan harusnya memperhatikan rencana yang telah dilakukan tahun sebelumnya, sehingga perlu memperhatikan hasil evaluasi yang telah dilakukan KLHK tujuannya untuk daya pacu dalam peningkatan kinerja yang dirasa kurang, menjadi tolak ukur perencanaan yang akan selanjutnya, serta melanjutkan keberhasilan yang telah dilaksanakan oleh KLHK. Sebagai upaya memberikan umpan balik dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, evaluasi Rencana Kerja KLHK Tahun 2019 dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan hierarki sasaran di setiap tingkatan kinerja yang ditampilkan pada setiap indikator kinerja utama (IKU) kementerian dengan memperhatikan peralihan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Berikut hasil laporan kinerja KLHK pada Tahun 2019.

## A. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

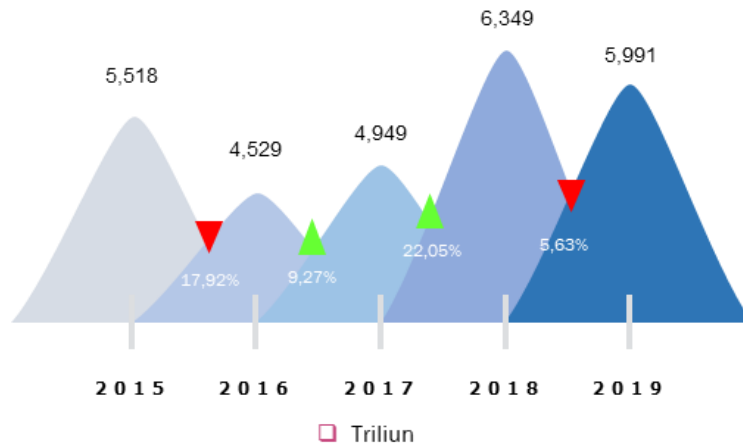
Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 adalah 66,5. Capaian IKLH Tahun 2019 sebesar 66,55. Target ini melampaui capaian target pada Rencana Strategis KLHK Tahun 2015-2019 sebesar 100,09%, namun indeks tersebut menurun sebesar 7,14% dibandingkan periode yang sama (Y o Y) di tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 KLHK akan menargetkan sebesar 68,71. Upaya Kementerian untuk mencapai IKLH tersebut dengan: (1) memperbaiki tata kelola agar semakin dapat mengendalikan laju penyusutan hutan, (2) menjaga hulu daerah aliran sungai sebagai destinasi wisata baru, beriringan dengan tumbuhnya geliat ekonomi dari berbagai komoditas hasil tanaman masyarakat, (3) membangun tabat kanal untuk memulihkan daya hidup dan interaksi sosial warga, dan (4) mengurangi beban lingkungan dengan penyediaan teknologi yang semakin ramah terhadap lingkungan dan kesehatan, sembari mempertahankan perikehidupan masyarakat dan dunia usaha.



Gambar 4.1 Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKTL tahun 2015-2019  
Sumber: Laporan Kinerja 2019 (KLHK 2019)

## B. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah PNBP Tahun 2019 sebesar Rp. 5,991 Triliun jumlah ini menurun dari PNBP 2018 sebesar Rp. 6,349 Triliun, namun target 2019 tersebut telah melampaui target pada Rencana Strategis KLHK Tahun 2015-2019 yaitu sebesar Rp. 3,500 Triliun. Pendapatan Kehutanan terbesar berasal dari (MAP 4214) yang berasal dari Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi sebesar Rp. 5.194,42 Miliar. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (MAP 4257) sebesar Rp. 364,36 Miliar. Pendapatan Jasa yang berasal dari wisata, iuran, dan jasa bidang lingkungan hidup dan kehutanan (MAP 4256) sebesar Rp. 205,31 Miliar. Angka ini menurun 5,63% dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Capaian Kinerja Tahun 2019 sebesar 153,57 % terhadap capaian Rencana Strategis KLHK Tahun 2015-2019.



Gambar 4.2 Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang LHK Tahun 2015-2019  
Sumber: Laporan Kinerja 2019 (KLHK 2019)

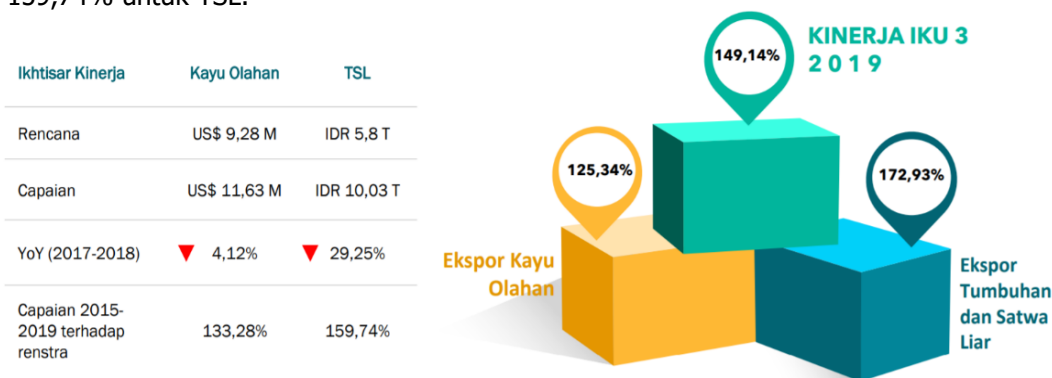
Salah satu upaya KLHK dalam membantu kegiatan di tapak saat pandemi COVID-19 yaitu membina dan membantu memasarkan hasil dari HHBK yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat sekitar hutan

Dokumentasi Sekretariat Direktorat Jenderal PSKL



### C. EKSPOR HASIL HUTAN

Indeks Kinerja Utama 3 Nilai Ekspor disumbangkan dari kayu olahan dan TSL. Nilai ekspor kayu olahan Tahun 2019 sebesar US\$ 11,63 Miliar. Perolehan tersebut turun sebesar 4,12% dibandingkan capaian Tahun 2018. Perbandingan rencana dan capaian Tahun 2019 menggambarkan kinerja sebesar 125,34% untuk ekspor kayu olahan. Sedangkan untuk ekspor TSL memberikan hasil kinerja sebesar 172,93% dengan capaian mencapai Rp. 10,03 triliun. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 29,25%. Perbandingan kumulatif nilai ekspor 2015 - 2019 dengan target kinerja hingga 2015 - 2019 memberikan angka 133,30% untuk kayu olahan dan 159,74% untuk TSL.



Gambar 4.3 Capaian Ekspor Hasil Hutan Tahun 2015-2019

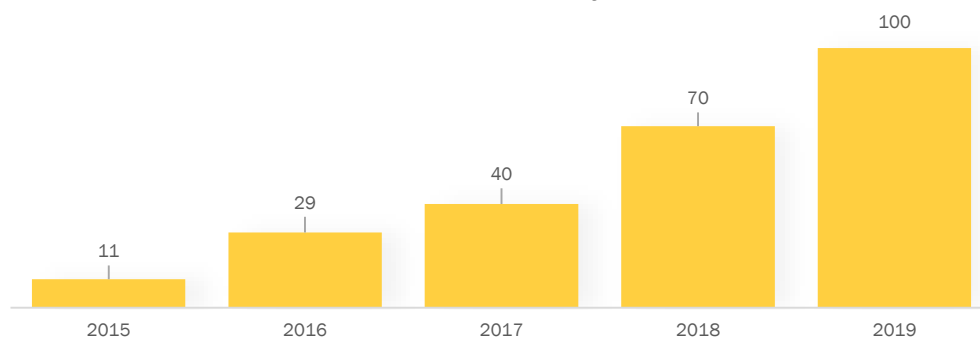
Sumber: Laporan Kinerja 2019 (KLHK 2019)

### D. KAWASAN KONSERVASI DENGAN NILAI MINIMAL 70

Perbaikan pengelolaan unit kawasan konservasi ditunjukkan dengan adanya nilai *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT). Nilai METT yang menunjukkan pengelolaan membaik pada setiap Kawasan konservasi harus memiliki nilai minimal 70. Nilai METT bertujuan menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung maupun tidak langsung. Kawasan Konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan, sangat menentukan tidak hanya keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasannya tapi juga bagi daerah penyangga di sekitarnya. Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi akan membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga di sekitarnya dan bahkan terasa dampaknya di tingkat regional dan nasional. Entitas pengukuran adalah Kawasan Suaka Alam, yang terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (SM), serta Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Di luar KSA/KPA terdapat juga Taman Buru. Pengelolaan Kawasan konservasi dirasa semakin baik. Tampak dari tahun ke tahun Kawasan konservasi yang memiliki nilai efektifitas diatas 70 poin semakin semakin banyak. Tahun 2016 Kawasan konservasi yang sudah efektif



pengelolaanya hanya 29 unit, meningkat menjadi 40 unit di tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali menunjukkan tren positif dimana kawasan konservasi yang telah efektif menjadi 70 unit. Dan ditahun 2019 Kawasan konservasi menjadi 100 unit.



Gambar 4.4 Jumlah Kawasan Konservasi dengan nilai efektifitas pengelolaan minimal 70

Sumber: Laporan Kinerja 2019 (KLHK 2019)

## E. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Hingga tahun 2019 kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebesar 154,90%. Persentase tersebut berasal dari ketercapaian jumlah KPH yang telah memproduksi barang dan jasa sebanyak 102 KPH, intervensi yang dilakukan ditahun 2019 mendorong 53 KPHP dan 105 KPHL. Total KPH baik dikawasan produksi maupun lindung yang sudah ditetapkan sebanyak 618 unit dengan luas 84.630.966 Ha. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 381 unit dengan luas 58.778.985 Ha. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 237 unit dengan luas 25.851.981 Ha. Selain KPHP dan KPHL, terdapat juga Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) dimana jumlahnya sebanyak 148 unit dengan luas 12.946.252. KPHK tidak termasuk kedalam KPH yang didorong untuk memproduksi barang dan jasa.

Tabel 4.2 Jumlah dan Luas KPH pada Tahun 2019

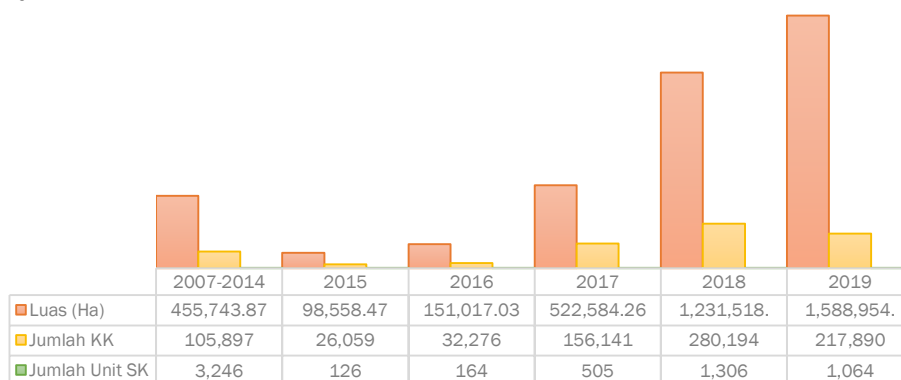
KPH	Unit	Luas (Ha)
KPHP	381	58.778.985
KPHL	237	25.851.981
KPHK*	148	12.946.252

Keterangan: \* tidak diperjanji kinerjanya

Sumber: Laporan Kinerja 2019 (KLHK 2019)

## F. KINERJA AKSES KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

Tahun 2019 menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan rencana strategis perhutanan sosial untuk 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat. Hasil kumulatif capaian tersebut sampai tahun 2019 sebesar 4.048.376,81 Ha, hasil ini lebih kecil dari capaian kumulatif target Rencana Startegis Tahun 2015-2019. Perhutanan sosial membuat trobosan untuk mencapai target tersebut dengan beberapa skema: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK), yang merupakan pengakuan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Secara umum capaian kinerja akses kelola perhutanan sosial tahun 2019 sebesar 1,58 juta Ha, jika dibandingkan dengan target yang diperjanjikan maka diperoleh capaian kinerja sebesar 158,9 %, meningkat 29,02 % dari tahun 2018 (1.264.156 Ha). Capaian luas Perhutanan Sosial tahun 2019 terbagi atas Hutan Desa 274.389,94 Ha, Hutan Kemasyarakatan 148.887 Ha, Hutan Tanaman Rakyat 20.634 Ha, Hutan Adat 932.470,13 Ha, dan Kemitraan seluas 212.022,84 Ha serta IPHPS 551 Ha



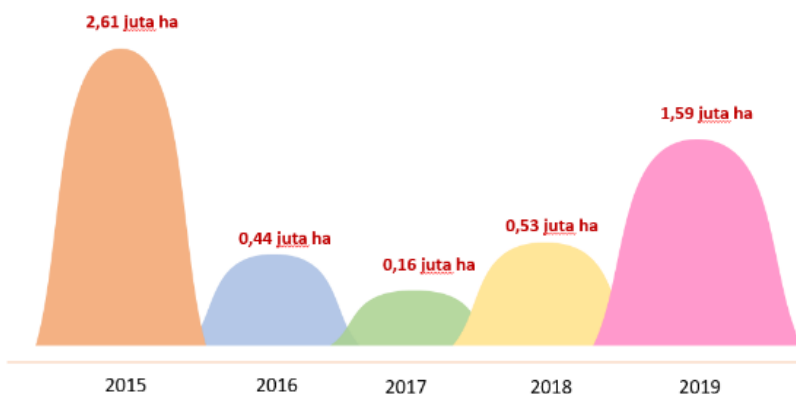
Gambar 4.5 Perkembangan Perhutanan Sosial Tahun 2015-2019

Sumber: Laporan Kinerja 2019 (KLHK 2019)

## G. PROVINSI YANG DAPAT DILINDUNGI DARI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Ada 7 (tujuh) provinsi prioritas yang telah dilindungi dari bahaya kebakaran hutan di tahun 2018 yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini, kinerjanya dapat dirasakan dengan luas kebakaran hutan dan lahan yang cenderung berkurang, pada tahun 2018 luas kebakaran hutan dan lahan 0,53 juta ha meningkat pada tahun 2019 menjadi 1,59 juta ha. Total luasan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1,59 juta ha. Luasan kebakaran tersebut berdasarkan fungsi kawasan antara lain hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi

terbatas, hutan produksi, hutan produksi konservasi, dan areal penggunaan lain. Jumlah luasan kebakaran hutan dan lahan paling tinggi adalah areal penggunaan lain sejumlah 719.701 ha, disusul dengan hutan produksi sebesar 307.265 ha dan hutan konservasi sebesar 221.372 ha.



Gambar 4.6 Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Seluruh Indonesia Tahun 2015-2019  
 Sumber: Laporan Kinerja 2019 (KLHK 2019)

Kegiatan pembinaan kepada masyarakat sekitar hutan agar mandiri dalam menjaga kelestarian hutan dan menciptakan nilai ekonomi dari hasil hutan yang diperoleh tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan

Dokumentasi Sekretariat  
 Direktorat Jenderal PSKL



Saat ini zamannya bukan konflik antara manusia dan satwa, namun zamannya manusia dan satwa bekerja sama dalam melindungi hutan dari gangguan. Perlindungan hutan merupakan kunci dalam menekan perembahan dan kebakaran hutan dan lahan.

Dokumentasi BKSDA Bengkulu







## V. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Di dalam Rencana Kerja (Renja) KLHK 2021 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainsteaming*), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut.

### 1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamaan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

### 2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.



### 3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

### 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.



## **VI. PENUTUP**

Rencana Kerja KLHK Tahun 2021 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama demi mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tantangan pada Tahun 2021, KLHK harus berkontribusi dalam mengurangi dampak berupa menyambungkan kembali terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, menstabilkan mobilitas masyarakat, dan menghidupkan kembali kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada menurunnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan. Selain menjawab tantangan-tantangan di Tahun 2021, KLHK harus selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan.

Rencana Kerja KLHK Tahun 2021 telah memasukkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN dan Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2021 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan agar dapat ditindaklanjuti berupa Rencana Kerja Eselon I atau Eselon II atau Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum pada RKP ini diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak dan sarana mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan, sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumber daya hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.





**LAMPIRAN RENCANA KERJA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TAHUN 2021**

## LAMPIRAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2021

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										108.575.810,00
5441-Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK										27.055.810,00
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7	Unit					Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan	4.600.000,00
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	900	Orang						12.183.231,00
	EAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	35	Orang						2.875.000,00
	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.100	Orang	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		4.397.579,00
	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	002-Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	1.500	Orang	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		3.000.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5442- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan										76.000.000,00
	RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Sekolah	3	unit	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat	15.302.000,00
	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	479	Orang	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07-Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01-Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02-Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		60.698.000,00
5443- Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan										5.520.000,00
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-SDM Masyarakat yang terlatih dalam Pengelolaan lingkungan hidup dan Kehutanan	1.530	Orang					Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur	3.060.000,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Kepedulian dan Budaya Lingkungan Hidup	365	Lembaga	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup		2.460.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
<b>029.FB-Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>										<b>200.949.088,00</b>
5446-Adaptasi Perubahan Iklim										6.000.000,00
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Kampung Iklim	200	Kelompok Masyarakat					Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	4.000.000,00
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Tingkat Kerentanan dan Resiko Perubahan Iklim	1	layanan						2.000.000,00
5447-Mitigasi Perubahan Iklim										27.520.950,00
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Pemantauan Aksi Mitigasi yang Tervalidasi	1	layanan					Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	3.000.000,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Implementasi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Bahan Perusak Ozon	3	Lembaga	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah		1.000.000,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Pre Invesment Bio Carbon Fund For Initiative Sustainable Forest Landscape	1	Lembaga						15.080.950,00
	QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-HCFC Phase Out In The Polyurethane Foam Sector Project	3	Badan usaha	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah		8.440.000,00



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi										6.000.000,00
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	1	layanan					Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	4.000.000,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi Penyediaan Data Inventarisasi GRK dan Verifikasi serta Registri yang termutakhirkan	5	Daerah (Prov/Kab/Kota)				2.000.000,00		
5449-Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim										5.000.000,00
	ABS-Kebijakan Bidang Ketahanan bencana dan perubahan iklim	001-Bahan atau Rumusan Kebijakan Sumber Daya Pendanaan dan Perundingan Perubahan Iklim	2	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	3.000.000,00
	BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Sains dan Informasi Teknologi Rendah Karbon yang ditingkatkan	350	Orang				2.000.000,00		
5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan										156.428.138,00
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pencegahan Kebakaran hutan dan Lahan	1.200	Kelompok Masyarakat	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	126.782.438,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QHC-Operasi Bidang Penanganan Bencana	001-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pemasukan Darat	1.200	operasi	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan		13.057.500,00
	QHC-Operasi Bidang Penanganan Bencana	002-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemasukan Udara	170	operasi	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan		16.588.200,00
<b>029.FD-Program Kualitas Lingkungan Hidup</b>										<b>834.926.008,00</b>
5408-Pengendalian Kerusakan Perairan Darat										10.137.954,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Layanan Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	1	Lembaga					Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,	3.000.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat	240	Unit	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan	2.638.000,00
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Danau dan Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya	15	unit	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	02-Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional		2.899.954,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Mata Air yang Dipulihkan	100	unit	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	05-Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	01-Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua	1.600.000,00
5424-Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial										14.572.951,00
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kebijakan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi	1.120.075,00
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2	Rekomendasi Kebijakan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi	2.226.750,00
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	003-Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	35	Rekomendasi Kebijakan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan,	2.945.250,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	6.202.204	Layanan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	8.280.876,00
5436-Pencegahan Dampak Lingkungan										17.752.807,00
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-RPPLH Nasional yang disusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	7	Rekomendasi Kebijakan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung	1.400.000,00
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	1	Rekomendasi Kebijakan	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara		1.000.000,00
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	5	layanan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif		1.000.000,00
	UBA-Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	15	Daerah (Prov/Kab/Kota)	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah		3.550.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH	2	layanan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi		6.000.000,00
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	003-Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	3	Rekomendasi Kebijakan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		4.469.807,00
	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		333.000,00
5393-Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan										1.831.569,00
	BJA-Penyidikan dan Pengujian Produk	001-Penyidikan dan Pengujian Produk pada Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup	100	Produk					Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat	488.425,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	BJB-Penyidikan dan Pengujian Peralatan	001-Penyidikan dan Pengujian Peralatan Laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang akurat dan ketertelusuran pengukuran	200	Unit						209.325,00
	DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	001-Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan	1	produk						52.580,00
	PDF-Sertifikasi Lembaga	001-Sertifikasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan	2	Lembaga	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah		1.081.239,00
5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup										13.461.000,00
	QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	001-Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup	25	Perkara	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Provinsi DKI Jakarta	13.461.000,00
5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi										36.830.000,00
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Peningkatan Kapasitas PPLH	150	Orang					Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi	10.620.800,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	700	Lembaga	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Selatan, dan Provinsi Papua Barat	26.209.200,00
5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan										57.450.000,00
	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Peningkatan kapasitas PPNS	200	Orang					Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi	21.890.000,00
	QCA-Perkara Hukum Perseorangan	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21 Perseorangan	165	Perkara	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Selatan, dan Provinsi Papua Barat Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung	31.629.407,00
	QCD-Perkara Hukum Badan Usaha	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21 Badan Usaha	7	Perkara	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		3.930.593,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5452-Pengelolaan B3										9.100.000,00
	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan B3	4	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Timur	1.100.000,00
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Registrasi, Notifikasi, dan Rekomendasi Pengangkutan B3	200	Badan usaha						600.000,00
	CBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Prasarana Fasilitas storage depo alat kesehatan mengandung Merkuri	8	unit						3.200.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di Daerah PESK	2	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pengurangan dan Penghapusan Merkuri		3.600.000,00
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3	1	Sistem Informasi						600.000,00
5454-Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3										77.940.000,00
	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	5	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi	1.300.000,00



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	ACD-Perizinan Lembaga	001-Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	400	Institusi					Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua	7.700.000,00
	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	3.000	Industri						4.500.000,00
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 dan Limbah Non-B3	2	Unit						10.640.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasyankes	4	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu		53.800.000,00
5455-Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3										17.900.000,00
	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3	1	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur	300.000,00
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Sistem Kesiapsiagaan Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3 di Daerah	2	layanan						600.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Pembinaan dan Supervisi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi	8	Industri						3.070.000,00
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi	2	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3		13.930.000,00
5456-Pengelolaan Sampah										89.388.000,00
	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Pembinaan dan Fasilitasi Bank Sampah	100	UMKM					Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua	13.568.000,00
	BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha	001-Fasilitasi penerapan EPR untuk pengurangan sampah	15	Badan usaha						1.468.500,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target pengurangan Jakstrada	35	Daerah (Prov/Kab/Kota)						6.993.750,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Fasilitasi dan Pembinaan Kab/kota untuk memenuhi target penanganan Jakstrada	35	Daerah (Prov/Kab/Kota)						12.743.750,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Penilaian Kinerja Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui ADIPURA	310	Daerah (Prov/Kab/Kota)						23.514.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas	7	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik		16.400.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional	5	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik		9.600.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum	4	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik		5.100.000,00
6033-Pemantauan Kualitas Lingkungan										146.127.992,00
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Informasi Kualitas Udara Manual	500	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi	6.500.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	12	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut		28.800.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
QMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Kualitas Air Manual	591	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	7.000.000,00	
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis	21	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	25.522.652,00		
QMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Kualitas Air Laut	34	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	5.400.000,00		
QMA-Data dan Informasi Publik	004-Data dan Informasi Sampah Laut	23	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	2.305.340,00		
QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	34	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	2.600.000,00		
QMA-Data dan Informasi Publik	006-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut	19	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	4.000.000,00		

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QMA-Data dan Informasi Publik	007-Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut pada 7 Provinsi	106	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan		49.000.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Alat Pemantauan Tinggi Muka Air Tanah di Lahan Gambut pada 7 Provinsi	30	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut		15.000.000,00
6034-Pengendalian Pencemaran Lingkungan										75.644.660,00
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	001-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara	2.625	Industri	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur,	2.000.000,00
	QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri	002-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Pencemaran Air	2.625	Industri	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan		7.000.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum	10	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		10.000.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		002-Instalasi Pengolahan Air Limbah	43	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua	40.850.000,00
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		001-Fasilitasi Pemantauan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	33	Daerah (Prov/Kab/Kota)	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan		500.000,00
QDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		001-Layanan Penilaian Kinerja Pelabuhan yang Melaksanakan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut	25	Badan usaha	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan		900.000,00
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		002-Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	12	Daerah (Prov/Kab/Kota)	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	02-Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		12.394.660,00
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri		003-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan	85	Industri	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan		1.000.000,00
QDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri		004-Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	350	Industri	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan		1.000.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
6035-Pemulihan Kerusakan Lingkungan										266.789.075,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Padang Lamun/Terumbu Karang yang dipulihkan Fungsinya	4	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua	1.000.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	004-Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan	30	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3		23.050.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Lahan Gambut yang direstorasi pada 7 Provinsi	1.400	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan		216.000.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	005-Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya	1.500	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut		3.000.000,00
	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	001-Fasilitasi Desa mandiri peduli gambut di 7 Provinsi	75	Desa	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan		20.000.000,00
	UBB-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	002-Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut	30	Desa	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan		3.739.075,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
<b>029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>										<b>3.288.257.788,00</b>
5397-Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi										109.815.239,00
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	NSPK					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provisnsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	350.051,00
	BAB-Pelayanan Publik kepada lembaga	001-Layanan Pengesahan RPHJP	30	Lembaga						1.267.810,00
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan	6	layanan						680.020,00
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi	1	layanan						650.401,00
	BEF-Bantuan Luar Negeri	001-HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan	4	Kegiatan						13.339.680,00
	BEF-Bantuan Luar Negeri	002-HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Commonity Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	19	Kegiatan						41.900.000,00



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	103	Lembaga						6.514.907,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	10	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		1.874.870,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi dan Pembinaan KPHP Menuju Kategori Maju	71	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		43.237.500,00
5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi										24.856.291,00
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	3	NSPK					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi	1.185.263,00
	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi yang diawasi dan dikendalikan	57	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan		10.111.736,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	20	Badan usaha	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	Papua Barat, dan Provinsi Papua	2.771.796,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	20	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan		10.787.496,00
5399-Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan										12.073.715,00
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	5	NSPK					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi	1.560.300,00
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan	275	Badan usaha						2.223.482,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	275	Lembaga						4.472.613,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Peredaran Hasil Hutan	275	Lembaga						2.316.786,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan yang diawasi dan dikendalikan	40	Lembaga					Papua Barat, dan Provinsi Papua	1.500.534,00
5400-Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)										14.896.667,00
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	5	NSPK					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	1.201.027,00
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	10	Badan usaha						2.136.435,00
	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan	52	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan		2.657.267,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	7	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan		5.713.422,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	29	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan		3.188.516,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan										26.273.219,00
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	1	NSPK					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	352.200,00
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	150	Badan usaha						1.600.000,00
	BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	200	UMKM						12.499.900,00
	BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001-Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan Kinerjanya	118	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan		8.075.879,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	1	Rekomendasi Kebijakan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan		500.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m3/tahun ke atas	36	layanan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan		900.000,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Pembinaan Teknis/ Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	150	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan		2.345.240,00
5404-Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air										1.599.202.608,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Layanan Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	1	Lembaga					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI	4.500.137,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Kelompok Kerja Mangrove dan Forum Peduli Mangrove yang Meningkatkan Kapasitasnya	34	Lembaga	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan		3.082.575,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	56.000	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	1.443.230.357,00	
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Sipil Teknis	2.500	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01-Penanggulangan Bencana	03-Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan		52.779.575,00	
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Rehabilitasi Hutan Mangrove	1.250	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	01-Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan		30.352.427,00	
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	004-Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS sekitarnya	1.500	Unit	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara		22.521.000,00	
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	005-Forest Program II	2	Unit						35.796.210,00	
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	006-Forest Program III	1	Unit						6.940.327,00	

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5405-Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung										37.340.950,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Layanan Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	1	Lembaga					Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat	3.000.000,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-KPHL Maju	10	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		1.722.120,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Fasilitasi Produksi HHBK	3.000	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	01-Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan		1.343.550,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Forest Programme IV Sulawesi Barat	3	Unit						31.275.280,00
5406-Penyelenggaraan Pengelolaan DAS										23.028.294,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Layanan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	1	Lembaga					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat,	3.500.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga/Forum Peduli DAS yang Meningkatkan Kapasitasnya	34	Lembaga	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	3.429.950,00
	UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Data dan Informasi DAS Aktual/ Real Time	1	Sistem Informasi	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	16.098.344,00



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5407-Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan										164.637.402,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Layanan Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	1	Lembaga					Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi	3.000.000,00
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Sumber Benih Unggul yang Dibangun	100	unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi	5.170.077,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	42.500.000	unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Papua Barat, dan Provinsi Papua	150.000.000,00
	RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Benih Berkualitas	40.000.000	unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	02-Peningkatan Ketahanan Iklim	02-Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim		6.467.325,00
5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam										79.073.074,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Hibah Luar Negeri Forest Programme III – Sulawesi	2	Lembaga					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,	20.009.839,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi Kebijakan Pemolaan, Informasi Konservasi Alam, dan Kerjasama	5	Rekomendasi Kebijakan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif		5.150.000,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	56	Rekomendasi Kebijakan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif		9.839.617,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	5.340.679	Layanan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	37.263.618,00
	QMA-Data dan Informasi Publik	002-Layanan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati	1	layanan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	07-Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem		760.000,00
	QMA-Data dan Informasi Publik	003-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	2	layanan	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara		6.050.000,00
5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi										368.379.780,00
	AED- Perjanjian	001-Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	90.080	Perjanjian					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI	33.193.152,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	1.833	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif		74.609.196,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-HLN Forest Programme IV Sulawesi	1	Lembaga					Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	9.264.420,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	003-HLN Biodiversity Leuser	3	Lembaga						29.307.626,00
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	004-HLN Forest Programme II Sumatera	2	Lembaga						11.779.264,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Penanganan area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	1	Rekomendasi Kebijakan						2.500.000,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	218.423	Rekomendasi Kebijakan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif		95.174.335,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan						2.000.000,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	004-Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan						2.000.000,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	005-Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1	Rekomendasi Kebijakan						4.000.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	006-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	277	Rekomendasi Kebijakan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif		95.951.787,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	1	Unit	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara		8.600.000,00
5422-Konservasi Spesies dan Genetik										238.532.857,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Mekanisme Pendanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	1	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau,	500.000,00
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	140	Rekomendasi Kebijakan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi	73.535.414,00
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	002-Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keamanan hayati	4	Rekomendasi Kebijakan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah		9.630.080,00
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Entitas perlindungan, dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	52	Lembaga	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah		8.219.391,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	413	Lembaga	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	01-Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	04-Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	4.500.572,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pusat Konservasi Satwa yang dibangun	3	Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah		142.147.400,00
5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi										87.497.012,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	11	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,	2.800.000,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	20	Rekomendasi Kebijakan				3.000.000,00		
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-HLN Forest Investment Program Project I	2	Lembaga				7.194.570,00		
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam yang Dikembangkan	20	layanan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas		1.500.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam Rangka Ekowisata (Wisata Alam, SAVE, dan Bahari)	48	Kelompok Masyarakat	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua	9.652.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Destinas Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	15	Unit	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas		27.260.000,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Destinas Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang Dikembangkan	7	Unit	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas		8.927.790,00
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	003-Destinas Wisata Alam Bahari yang Dikembangkan	4	Unit	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas		1.900.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	004-Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	48	Unit	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas		25.262.652,00
5433-Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan										130.388.036,00
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30	layanan					Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara,	445.000,00
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Informasi dan dokumentasi penguatan dan penatagunaan kawasan hutan	1	layanan						320.000,00
	PCD-Perizinan Lembaga	001-SK Penetapan Kawasan Hutan	12	Institusi	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		1.540.000,00
	PCD-Perizinan Lembaga	002-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	14	Institusi	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)		2.000.000,00



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	1	layanan	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	04-Pembangunan Ibu Kota Negara	Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	2.000.000,00
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	6	layanan						1.159.443,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	14	Rekomendasi Kebijakan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)		26.928.596,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	19	Rekomendasi Kebijakan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		95.994.997,00
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan										11.993.681,00
	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1	layanan					Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI	1.880.000,00
	BMA-Data dan Informasi Publik	004-Layanan Informasi Geospasial	1	layanan						1.400.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	BMA-Data dan Informasi Publik	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	83	layanan					Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	5.854.949,00
	BMA-Data dan Informasi Publik	003-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22	layanan						2.858.732,00
5435-Perencanaan Kawasan Hutan										8.990.260,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan	8	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua	1.148.000,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3	Rekomendasi Kebijakan						620.000,00
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan	300	layanan						1.300.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1	Rekomendasi Kebijakan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		1.762.280,00
	QMA-Data dan Informasi Publik	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1	layanan	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan		350.000,00
	QMA-Data dan Informasi Publik	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1	layanan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	03-Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)		500.000,00
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	001-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	44	Badan usaha						3.309.980,00
5444-Peningkatan Penyuluhan										8.519.500,00
	QDC-Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	1.500	Orang	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pusat	4.119.500,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri yang terbentuk	80	Kelompok Masyarakat	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan		2.100.000,00
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	70	Kelompok Masyarakat	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	02-Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	03-Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi Kelompok Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan		2.300.000,00
6031-Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan										50.464.449,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	3	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku	1.400.000,00
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Forest Programme II (Development of Biodiversity Conservation and Watershed Management) Forest Programme II (FP II)	3	Kelompok Masyarakat						14.604.449,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rekomendasi penyiapan akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, KK, IPHPS	5	Rekomendasi Kebijakan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		16.460.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi	100	Rekomendasi Kebijakan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		2.200.000,00
	PCC-Perizinan Kelompok Masyarakat	001-Izin akses kelola Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKM, KK, IPHPS	5	Kelompok Masyarakat	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		3.750.000,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	3	Rekomendasi Kebijakan						1.400.000,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	003-Hutan Adat dan Hutan Hak yang ditetapkan	15	Rekomendasi Kebijakan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		4.500.000,00
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan	30	layanan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		2.700.000,00
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Kasus konflik tenurial yang difasilitasi penanganannya	30	layanan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		3.450.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
6032-Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan										221.389.754,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Kebijakan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	3	Rekomendasi Kebijakan					Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku	1.400.000,00
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Community focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation Forest Investment Program I (FIP I)	2	Kelompok Masyarakat						36.757.479,00
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Forest Investment Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project Dorest Investment Program II (FIP-II)	1	Kelompok Masyarakat						7.583.065,00
	BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	003-Forest Programme III - Sulawesi Programme	1	Kelompok Masyarakat						8.537.210,00
	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-Rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial yang disahkan	310	Kelompok Masyarakat	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		3.603.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang ditingkatkan menjadi kelas Gold/Platinum	75	UMKM	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		15.000.000,00
	QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat	001-Sarana dan Prasarana peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	1.520	Kelompok Masyarakat	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		97.371.600,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	002-Kebijakan Kemitraan Lingkungan	3	Rekomendasi Kebijakan						1.400.000,00
	PEE-Kemitraan	001-Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang ditingkatkan	100	Kesepakatan	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		5.200.000,00
	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	1.510	Orang	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	06-Pengentasan Kemiskinan	04-Perhutanan Sosial	01-Pengelolaan Kawasan Hutan oleh Masyarakat		44.537.400,00
5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan										70.905.000,00
	QHB-Operasi Bidang Keamanan	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	90	operasi	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	24.335.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	QHB-Operasi Bidang Keamanan	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	73	operasi	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		44.070.000,00
	SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	360	Orang						2.500.000,00
<b>029.KB-Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</b>										<b>36.534.505,00</b>
5391-Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Bidang LHK										36.534.505,00
	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pembangunan sarana laboratorium	1	Unit					Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan	24.446.310,00
	CBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Laboratorium Pengelolaan Hutan	4	unit						63.000,00
	DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	001-Penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan	5	produk						712.550,00
	DDC-Penelitian dan Pengembangan Modeling	001-Pengelolaan KHDTK	38	model						2.174.436,00



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	SDC-Penelitian dan Pengembangan Modeling	001-Implementasi IPTEK Hasil Hutan, Jasa Lingkungan dan Keanekaragaman hayati	10	model	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	06-Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Dan Investasi Di Sektor Riil, Dan Industrialisasi	03-Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	01-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas		3.000.000,00
	CBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	002-Laboratorium Pengelolaan Nilai Tambah Hasil Hutan	1	unit						60.000,00
	DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	051-Penelitian dan Pengembangan Nilai Tambah Hasil Hutan	1	produk						440.000,00
	SDB-Penelitian dan Pengembangan Purwarupa	051-Pengembangan Sistem Aplikasi AIKO (alat identifikasi kayu otomatis) untuk mendukung Penegakan Hukum di bidang LHK	1	Purwarupa	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah		796.601,00
	DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	003-Penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim	3	produk						862.683,00
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	051-Kajian Kebijakan Bidang LHK	1	Rekomendasi Kebijakan	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah		60.698,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	002-Penelitian Integratif dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Tematik Daerah	14	produk						3.373.227,00
	DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	004-Penelitian Integratif dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim Tematik Daerah	2	produk						207.300,00
	DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk	007-Penelitian Integratif dan Pengembangan Nilai Tambah Hasil Hutan Tematik Daerah	1	produk						337.700,00
<b>029.WA-Program Dukungan Manajemen</b>										<b>3.487.871.584,00</b>
5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK										8.094.400,00
01-Biro Hubungan Masyarakat	EAI-Layanan Kehumasan dan Protokoler	001-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik	1	Layanan					Pusat	8.094.400
5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK										34.494.562
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	1	Layanan					Pusat	6.446.426,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	12	unit						907.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAJ-Layanan Data dan Informasi	001-Layanan Data dan Informasi	1	Layanan						5.541.299,00
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center	1	Sistem Informasi						14.999.969,00
	FAB-Sistem Informasi Pemerintahan	002-Forest Investment Programme II	1	Sistem Informasi						6.599.868,00
5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi										51.493.227,00
	EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	001-Layanan Perencanaan	1	Layanan					Pusat	21.255.000,00
	EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	002-Forest and Climate Change Programme Financial Cooperation	1	Layanan						30.238.227,00
5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK										317.035.749,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Gaji dan Tunjangan Pegawai	1	Layanan					Pusat	92.634.056,00
	EAA-Layanan Perkantoran	002-Layanan Operasional dan Pemeliharaan	1	Layanan						127.898.348,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Umum	1	Layanan						92.695.545,00
	EAC-Layanan Umum	002-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	1	Layanan						3.807.800,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5372-Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri										12.804.909,00
	AEA-Koordinasi	001-Layanan Kerjasama Internasional	1	kegiatan					Pusat	12.804.909,00
5374-Pengendalian Pembangunan LHK Regional										93.354.593,00
	EAA-Layanan Perkantoran	003-Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Jawa	1	Layanan					Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan	7.817.409,00
	EAA-Layanan Perkantoran	004-Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Jawa	1	Layanan						3.048.163,00
	EAC-Layanan Umum	002-Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Jawa	1	Layanan						972.000,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	002-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa	114	Daerah (Prov/Kab/Kota)						3.278.000,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Bali Nusra	1	Layanan						7.039.407,00
	EAA-Layanan Perkantoran	002-Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Bali Nusra	1	Layanan						3.738.110,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Bali	1	Layanan						608.648,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal P3E Bali-Nusra	41	unit					Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	527.240,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	001-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Balinusra	41	Daerah (Prov/Kab/Kota)						3.114.112,00
	EAA-Layanan Perkantoran	005-Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Kalimantan	1	Layanan						5.500.000,00
	EAA-Layanan Perkantoran	006-Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Kalimantan	1	Layanan						4.622.952,00
	EAC-Layanan Umum	003-Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Kalimantan	1	Layanan						2.250.000,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	003-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	56	Daerah (Prov/Kab/Kota)						3.000.000,00
	EAA-Layanan Perkantoran	007-Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Sulawesi Maluku	1	Layanan						6.663.730,00
	EAA-Layanan Perkantoran	008-Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Sulawesi Maluku	1	Layanan						4.814.794,00
	EAC-Layanan Umum	004-Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Sulawesi - Maluku	1	Layanan						2.038.215,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	004-Layanan Sarana Internal P3E Sulawesi - Maluku	10	unit						200.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAE-Layanan Prasarana Internal	004-Layanan Prasarana Internal Sulawesi - Maluku	4	unit						500.000,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	004-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku	102	Daerah (Prov/Kab/Kota)						3.221.785,00
	EAA-Layanan Perkantoran	009-Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Papua	1	Layanan						3.796.134,00
	EAA-Layanan Perkantoran	010-Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Papua	1	Layanan						3.389.554,00
	EAC-Layanan Umum	005-Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Papua	1	Layanan						1.265.000,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	42	Daerah (Prov/Kab/Kota)						4.985.000,00
	EAA-Layanan Perkantoran	011-Gaji dan Tunjangan Pegawai P3E Sumatera	1	Layanan						7.489.026,00
	EAA-Layanan Perkantoran	012-Layanan Operasional dan Pemeliharaan P3E Sumatera	1	Layanan						4.475.314,00
	EAC-Layanan Umum	006-Layanan dukungan manajemen satuan kerja P3E Sumatera	1	Layanan						1.466.084,00
	FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	006-Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera	154	Daerah (Prov/Kab/Kota)						3.533.916,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5380- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK										5.000.000,00
	EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	001-Layanan Pengelolaan PNBPN dan Piutang KLHK	1	Layanan					Pusat	2.156.345,00
	EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	002-Layanan Pengelolaan Keuangan	1	Layanan						2.843.655,00
5381- Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK										7.983.800,00
	EAF-Layanan SDM	001-Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	2.500	orang					Pusat	6.000.000,00
	EAH-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001-Layanan Manajemen Organisasi	1	Layanan						1.983.800,00
5382-Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan										5.047.500,00
	PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Rancangan Standardisasi Bidang LHK	32	NSPK	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	05-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Pusat	5.047.500,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5383-Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan										4.096.400,00
	EAG-Layanan Hukum	011-Layanan Hukum Bidang LHK	1	Layanan					Pusat	4.096.400,00
5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan										4.190.400,00
	ABJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH	6	Rekomendasi Kebijakan					Pusat	1.645.200,00
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	001-Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Kehutanan	6	Rekomendasi Kebijakan				2.545.200,00		
5860-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan										2.913.700,00
	AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	051-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH	3	NSPK					Pusat	2.913.700,00
5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK										53.513.724,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan					Pusat	35.591.066,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	8	Layanan				14.231.665,00		



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	001-Pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan	160	Orang						3.690.993,00
5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK										22.600.000,00
	EAK-Layanan Pengawasan Internal	001-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah I	86	Laporan					Pusat	5.500.000,00
	EAK-Layanan Pengawasan Internal	002-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah II	86	Laporan						5.500.000,00
	EAK-Layanan Pengawasan Internal	003-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah III	86	Laporan						5.900.000,00
	EAK-Layanan Pengawasan Internal	004-Pengawasan Internal pada Inspektorat Wilayah IV	86	Laporan						5.700.000,00
5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN										4.500.000,00
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	001-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	layanan					Pusat	2.000.000,00
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	002-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK	1	layanan						2.500.000,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari										154.360.563,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan perkantoran Kantor Pusat Ditjen PHPL	1	Layanan					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau,	46.975.872,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan					Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat,	13.133.508,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	146	unit					Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	3.406.204,00
	EAA-Layanan Perkantoran	002-Layanan perkantoran BPHP	16	Layanan						86.579.979,00
	EAC-Layanan Umum	002-Layanan Dukungan Manajemen Satker	16	Layanan						4.265.000,00
5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung										342.986.352,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	37	Layanan					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka	280.309.900,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan						27.720.248,00
	EAC-Layanan Umum	002-Layanan Dukungan Manajemen Satker	37	Layanan						28.113.142,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	37	unit					Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	3.834.367,00
	EAE-Layanan Prasarana Internal	001-Layanan Prasarana Internal	37	unit						3.008.695,00
5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem										1.137.325.579,00
	EAA-Layanan Perkantoran	994-Layanan Perkantoran	75	Layanan					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi	1.037.418.675,00
	EAC-Layanan Umum	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan						33.211.502,00



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAC-Layanan Umum	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	74	Layanan					Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	50.700.000,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	164	unit						9.338.902,00
	EAE-Layanan Prasarana Internal	001-Layanan Prasarana Internal	77	unit						6.656.500,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan										241.178.801,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	23	Layanan					Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua	208.516.167,00
	EAC-Layanan Umum	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan						9.364.270,00
	EAC-Layanan Umum	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	22	Layanan						11.782.570,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	599	unit						9.285.993,00
	EAE-Layanan Prasarana Internal	001-Layanan Prasarana Internal	10	unit						2.229.801,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
5390-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi										278.651.758,00
	EAA-Layanan Perkantoran	002-Layanan Perkantoran	17	Layanan					Pusat dan Provinsi Jawa Barat	260.469.741,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	17	Layanan						17.277.443,00
	EAE-Layanan Prasarana Internal	001-Layanan Prasarana Internal Set BLI	9	unit						904.574,00
5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM										191.193.660,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	15	Layanan					Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	166.852.830,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan						7.286.055,00
	EAC-Layanan Umum	002-Layanan Dukungan Manajemen Satker	10	Layanan						17.054.775,00
5440-Perencanaan dan Pengembangan SDM										4.954.995,00
	EAF-Layanan SDM	001-Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK	1.200	orang					Pusat	2.654.995,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAJ-Layanan Data dan Informasi	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1	Layanan						1.100.000,00
	EAJ-Layanan Data dan Informasi	002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1	Layanan						1.200.000,00
5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan										91.607.709,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	6	Layanan					Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku	59.964.270,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan						20.512.439,00
	EAC-Layanan Umum	002-Layanan dukungan manajemen satker	5	Layanan						7.000.000,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	356	unit						4.131.000,00
5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan										166.019.771,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran Setditjen PHLHK	1	Layanan					Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi	33.911.567,00
	EAA-Layanan Perkantoran	002-Layanan Perkantoran Direktorat PPSA	1	Layanan						1.096.100,00

Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAA-Layanan Perkantoran	003-Layanan Perkantoran Direktorat PSLH	1	Layanan					Selatan, dan Provinsi Papua Barat	733.930,00
	EAA-Layanan Perkantoran	004-Layanan Perkantoran Direktorat PPH	1	Layanan						1.268.080,00
	EAA-Layanan Perkantoran	005-Layanan Perkantoran Direktorat PHP	1	Layanan						1.161.379,00
	EAA-Layanan Perkantoran	006-Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)	1	Layanan						106.586.706,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan						12.419.465,00
	EAC-Layanan Umum	002-Layanan Dukungan Manajemen Satker Unit Pelaksana Tugas (UPT)	1	Layanan						5.000.000,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana dan Prasarana Internal Kantor Pusat	1	unit						3.842.544,00
5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim										100.930.018,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	6	Layanan					Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat	91.463.579,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1	6	Layanan						7.416.439,00
	EAD-Layanan Sarana Internal	001-Layanan Sarana Internal	58	unit						1.750.000,00



Program/Kegiatan	KRO	RO	Target	Satuan	PN	PP	KP	Pro-PN	Lokasi	Total
	EAE-Layanan Prasarana Internal	001-Layanan Prasarana Internal	17	unit						300.000,00
5451-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3										77.640.331,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan					Pusat	36.843.915,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	Layanan						40.796.416,00
5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup										73.899.083,00
	EAA-Layanan Perkantoran	001-Layanan Perkantoran	1	Layanan					Pusat	43.350.761,00
	EAC-Layanan Umum	001-Layanan Dukungan Manajemen Ditjen PPKL	1	Layanan						17.552.797,00
	EAA-Layanan Perkantoran	002-Layanan Perkantoran Badan Restorasi Gambut	1	Layanan						12.995.525,00
		<b>TOTAL</b>								<b>7.957.114.783,00</b>

